

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya suatu negara melakukan pembangunan di segala bidang, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Pembangunan yang dilakukan ini membutuhkan pendanaan yang sangat besar, dan sebagai sumber pendanaannya suatu negara menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Bagi negara Indonesia pendanaan tersebut diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana sumber pendanaannya berasal dari penerimaan dalam negeri maupun hibah. Penerimaan dalam negeri yang terbesar adalah berasal dari pajak, untuk tahun 2009 Indonesia menetapkan RAPBN sebesar Rp 1.022 Triliun dimana target penerimaan yang berasal dari perpajakan sebesar Rp 726,3 Triliun. Melalui pajak inilah nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung.

Melihat pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara maka, dalam Undang-undang no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikatakan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 215 juta jiwa merupakan potensi pajak yang sangat berlimpah. Namun, sangat disayangkan karena jumlah penduduk yang terdaftar sebagai Wajib Pajak/ pembayar pajak masih sangat sedikit, khususnya Wajib Pajak orang pribadi yang masih rendah tingkat kesadarannya. Hal ini menyebabkan tingkat penerimaan negara dari pajak kurang optimal.

Untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak maka, Indonesia belajar dari negara Australia dan Sri Lanka yang mensosialisasikan pentingnya *tax identification* bagi penduduknya, yaitu dengan menawarkan *tax amnesty* bagi mereka yang mendaftarkan dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Di Indonesia diberlakukan juga kebijakan yang serupa dengan *tax amnesty*, yaitu *sunset policy* yang memberikan pembebasan sanksi bagi mereka yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. *Sunset policy* ini bersifat sementara dan saat ini kebijakan tersebut telah dihapuskan, namun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru sebagai usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan memberikan pembebasan fiskal luar negeri kepada mereka yang telah memiliki NPWP.

Pembebasan fiskal luar negeri ini menimbulkan reaksi, bahwa dengan pembebasan tersebut maka akan terjadi anjloknya penerimaan negara dari sisi fiskal untuk menopang APBN. Penurunan penerimaan dari sisi fiskal sudah pasti terjadi, namun belum tentu hal itu menjadi suatu kerugian bagi negara. Hal ini dikarenakan kehilangan pendapatan tersebut diharapkan akan tergantikan oleh jumlah penerimaan dari pajak yang disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah orang yang mendaftarkan diri mereka untuk memiliki NPWP.

Pembebasan fiskal luar negeri ini didorong oleh banyaknya jumlah masyarakat Indonesia yang sering bepergian ke luar negeri tanpa memiliki NPWP, padahal mereka termasuk golongan ekonomi mampu. Melihat banyaknya masyarakat yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri ini jumlah masyarakat Indonesia yang sebenarnya berpotensi menjadi wajib pajak dan diharuskan memiliki NPWP cukup besar dan potensi penerimaan negara dari Wajib Pajak baru akan semakin meningkat.

Pembebasan fiskal bagi pemilik NPWP ini dapat menjadi stimulus yang cukup menarik, mengingat tarif fiskal luar negeri yang dikenakan bagi pengguna pesawat terbang sebesar Rp 2.500.000,00. Dengan memiliki NPWP mereka dapat melakukan penghematan dengan tidak perlu membayarkan biaya fiskal, terlebih lagi bila mereka melakukan perjalanan ke luar negeri lebih dari satu kali dalam setahun. Peluang inilah yang kemudian ditangkap oleh pemerintah, semakin banyak masyarakat yang menginginkan fasilitas ini semakin banyak penerimaan yang didapat dari sektor pajak karena setelah memiliki NPWP mereka diwajibkan untuk lapor dan setor, bahkan bila mereka lalai dalam melakukan kewajibannya maka akan dikenakan denda yang menjadi sumber penerimaan bagi pajak sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam apakah dengan adanya pembebasan fiskal luar negeri maka target penerimaan pajak dapat meningkat dengan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul

“Pengaruh Pembebasan Fiskal Luar Negeri Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan kebijakan pembebasan fiskal luar negeri bagi pemilik NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara?
2. Bagaimanakah penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara?
3. Apakah ada pengaruh antara penerapan kebijakan pembebasan fiskal luar negeri bagi pemilik NPWP terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tindak lanjut terhadap masalah yang telah diidentifikasi, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan pembebasan fiskal luar negeri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.
2. Untuk mengetahui jumlah penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembebasan fiskal luar negeri terhadap tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, memberikan pemahaman yang baik mengenai pengaruh pembebasan fiskal luar negeri terhadap tingkat penerimaan pajak negara.
2. Bagi KPP, memberikan penjelasan apakah kebijakan pembebasan Fiskal Luar Negeri yang ada telah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak dan sebagai masukan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak di KPP.
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai referensi untuk penelitian serupa yang lebih lanjut dan mendalam.